

SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH MELALUI E-MUSRENBANG



PENDAHULUAN



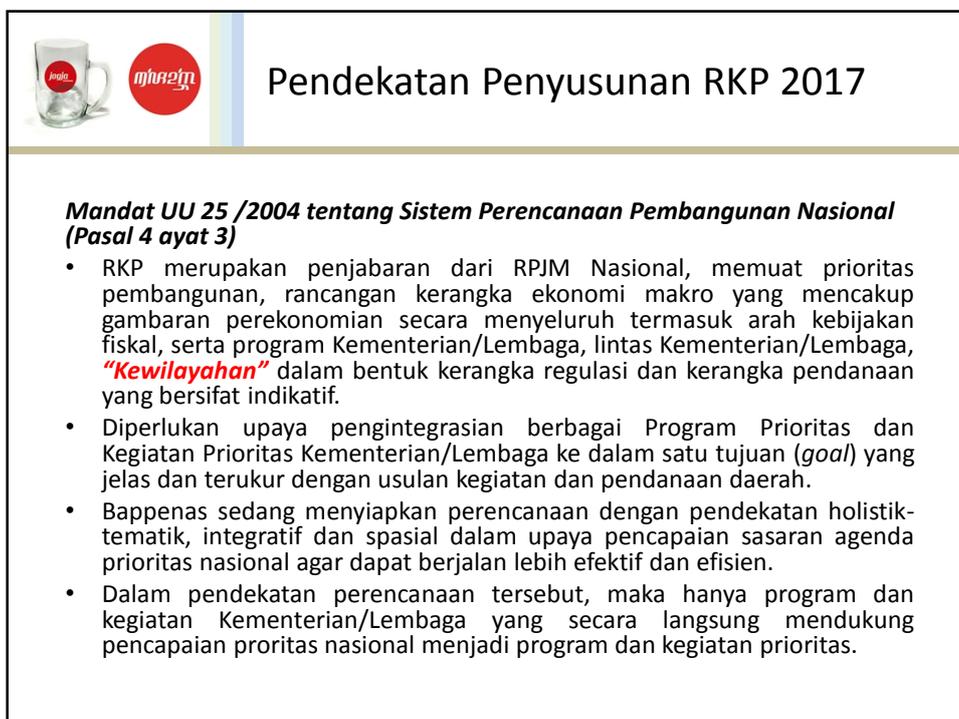
Penegasan Paradigma Perencanaan dan Penganggaran

- Amanat konstitusi menegaskan bahwa ANGGARAN NEGARA adalah INSTRUMEN untuk mencapai tujuan nasional.
- Politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh TUJUAN yang akan dicapai (*policy driven*), dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget driven*).
- Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan EFISIENSI, EFEKTIVITAS dan KEADILAN alokasi pengeluaran atau belanja pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.
- Proses perencanaan dan penganggaran adalah OPTIMALISASI SUMBERDAYA (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memperbaiki KUALITAS BELANJA.



Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017 (Hasil Sidang Kabinet 10 Februari 2016

- **TEMA RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.**
- Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
- Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak harus berdasarkan *money follow function*, tetapi ***money follow program prioritas***.
- Memangkas program yang nomenklturnya tidak jelas dan tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dstnya.





PENDEKATAN PEMBANGUNAN : HOLISTIK, TEMATIK, TERINTEGRASI, SPASIAL

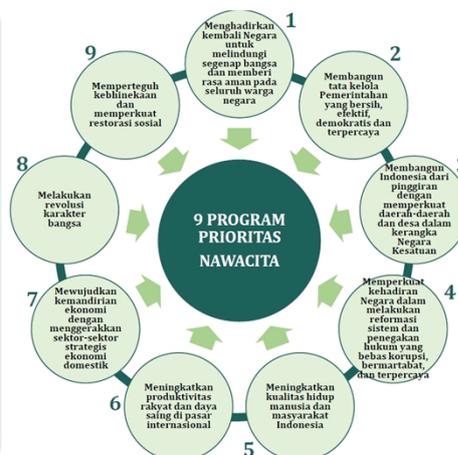


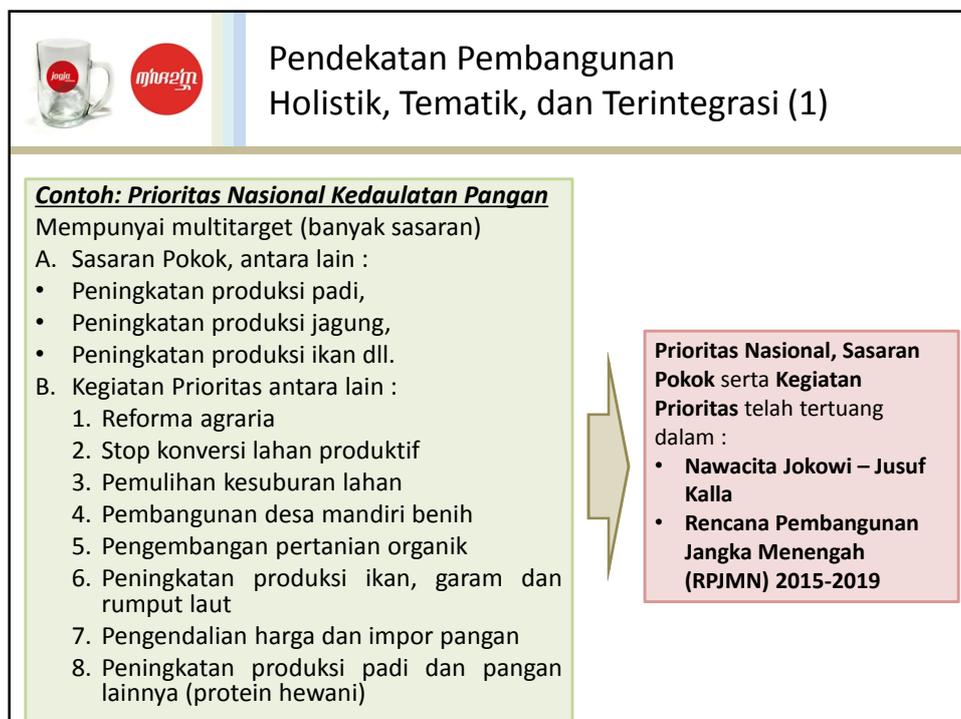
Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



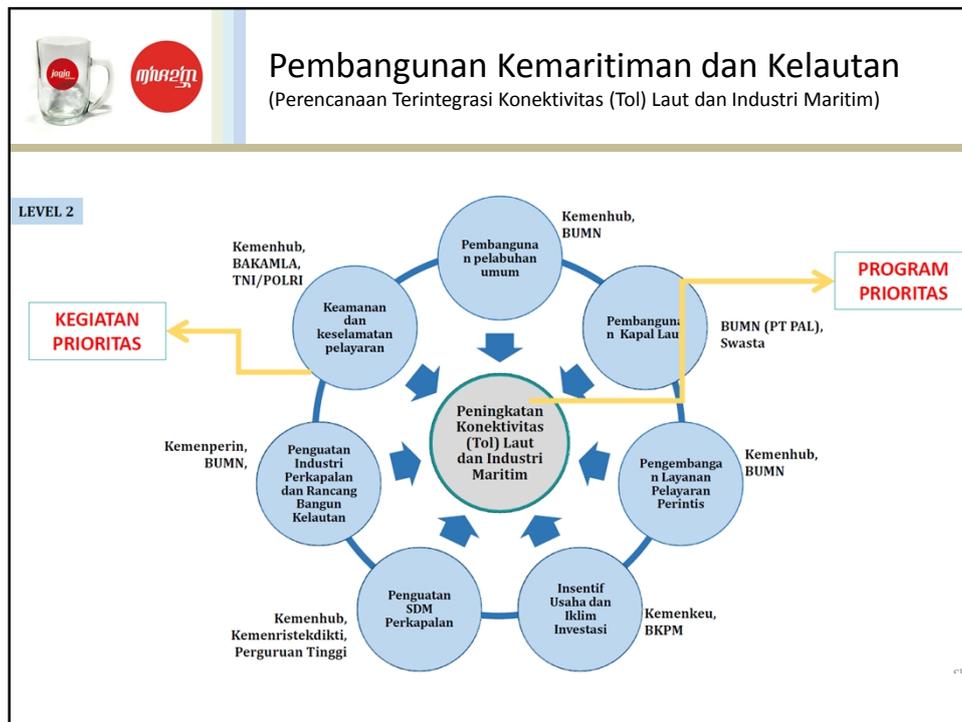





Pendekatan Pembangunan Holistik, Tematik, dan Terintegrasi (2)

- Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah.
- Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan, dst. (kombinasi berbagai program/kegiatan)
- Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar dll.







Bappenas dan Bappeda Sebagai Fungsi Integrator dalam Perencanaan Pembangunan



- Usulan program/kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target/sasaran Agenda Prioritas Nasional (NAWA CITA) pada RPJMN 2015-2019. Untuk itu, usulan program/kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L (lintas SKPD), maupun lintas wilayah.
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 menekankan pembiayaan berorientasi pada hasil pembangunan. Sehingga hanya program-program yang akan memperoleh prioritas pembiayaan adalah yang paling jelas manfaatnya bagi masyarakat.
- Selama ini, pembahasan dan pengusulan anggaran Program/Kegiatan serta pengalokasian Pagu Indikatif dilakukan secara sektoral per Kementerian/Lembaga (SKPD). Padahal, banyak sasaran/target program di K/L (SKPD) sektor yang memerlukan dukungan kegiatan dari K/L (SKPD) lain, namun K/L (SKPD) yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan utk mengkoordinasikan K/L lain.
- Hanya Kementerian PPN/Bappenas (Bappeda) yang mempunyai fungsi utama sebagai **koordinator perencanaan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kementerian/lembaga (lintas SKPD)**. Bappenas (Bappeda Provinsi) akan menjadi integrator setiap K/L (SKPD) dan pemerintah daerah (Pemerintah Kab/Kota) agar bisa bersinergi dalam menjalankan suatu program.



Kesiapan Bappenas Sebagai Sistem Integrator Pembangunan

- 1) Yang telah dan akan disiapkan Bappenas untuk penyusunan Perencanaan RKP 2017 :
 - Menetapkan sasaran dan arah kebijakan tiap-tiap agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2017.
 - Memetakan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan agar program prioritas dapat terlaksana Prioritas Nasional dan program prioritas telah tertuang dalam Agenda Nawa Cita Jokowi-Jusuf Kalla dan RPJMN 2015-2019 (*bersifat given*).
 - Memetakan Kementerian/Lembaga yang ikut berperan dalam melaksanakan kegiatan prioritas.
2. Terkait dengan arahan Bapak Presiden mengenai pendekatan *money follow program*, Bappenas telah menyiapkan :
 - Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator serta Target Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan prioritas.
 - Instrumen berupa Sistem Informasi untuk mendukung penjabaran tersebut. (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral>)
 - Indikasi Lokasi dan Indikasi Alokasi Anggaran per Program didiskusikan dengan Kementerian/Lembaga terkait melalui forum *Multilateral Meeting*.



Pengembangan Sistem Informasi Untuk Mendukung Bappenas Sebagai Sistem Integrator Pembangunan (1)

SIMU

Sistem Informasi Manajemen Kementerian Koordinator Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Dashboard

Serial Workshop

Report Form

Help Support

PRIORITAS

- Produk Melejit
- Pelayanan Kesehatan
- Keuangan dan Perekonomian
- Kedaulatan Pangan
- Kedaulatan Energi
- Keselamatan dan Kelautan
- Akses Kelangkaan Perikanan
- Sesuai Perencanaan
- Sesuai Tertinggal
- Desa dan Kawasan Pedesaan
- Perkotaan
- Keamanan dan Ketertarikan
- Kecepatan dan Pengawasan Hukum
- Konektivitas Demokrasi dan Efektivitas Operasional
- Reformasi Birokrasi
- Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (IKK)
- Pembangunan Perairan

Prioritas Pembangunan : Kedaulatan Pangan

Langkah 1 - Penentuan Sasaran Pokok RPJMN :

No	Indikator	Target Capaian					Keterangan	Aksi
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Produksi pangan utama / Padi (Juta ton)	74,99	76,2	77,21	-	82,2		
2	Produksi pangan non sereal/beras/pangan (Juga ton)	10,87	11,4	12,3	-	16,5		
3	Produksi pangan sereal/beras/pangan - kedelai (Juta ton)	0,987	1,5	1,85	-	2,6		
4	Produksi gula (Juta ton)	2,997	3,3	3,30	-	3,8		
5	Produksi sumber protein - daging sapi (Juta ton)	0,427	0,59	0,62	-	0,76		
6	Produksi sumber protein - ikan (Juta ton)	13,6	14,8	16,0	17,4	18,8		
7	Swar off	-	88,4	-	-	93,5		
8	Peningkatan dan Peningkatan Jaringan pangan air pemukiman, air tanah dan rawa (Juta ha)**	0,09	0,17	0,17	-	0,09		
9	Rehabilitasi jaringan pangan pemukiman, air tanah dan rawa (Juta ha)**	0,46	0,3	0,35	-	0,01		
10	Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (Juta ha)**	195,58	201,18	203,54	-	204,75		
11	Pembangunan/waduk** (Lmt)	13	8	20	-	49		

Langkah 2 - Penentuan Kegiatan Utama (FORM A):

1. Pengendalian Harga dan Impor Pangan.
2. Reforma Agraria
3. Stop Konversi Lahan Produktif.
4. Pembangunan Desa Mandiri Berbah
5. Peningkatan Produk Padi dan Pangan Lainnya (Protein Hewani)
6. Pengembangan Pertanian Organik
7. Peningkatan Produk Biji, Garam, dan Rumpuk Laut
8. Pemulihan Kesehatan Lahan



Pengembangan Sistem Informasi Untuk Mendukung Bappenas Sebagai Sistem Integrator Pembangunan (2)

SIMU

Sistem Informasi Manajemen Kementerian Koordinator Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Dashboard

Serial Workshop

Report Form

Help Support

PRIORITAS

- Akses Kelangkaan Perikanan
- Sesuai Perencanaan
- Sesuai Tertinggal
- Desa dan Kawasan Pedesaan
- Perkotaan
- Keamanan dan Ketertarikan
- Kecepatan dan Pengawasan Hukum
- Konektivitas Demokrasi dan Efektivitas Operasional
- Reformasi Birokrasi
- Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (IKK)
- Pembangunan Perairan

8	Produksi sumber protein - ikan (Juta ton)	13,6	14,8	16,0	17,4	18,8		
7	Swar off	-	-	88,4	-	93,5		
8	Peningkatan dan Peningkatan Jaringan pangan air pemukiman, air tanah dan rawa (Juta ha)**	0,09	0,17	0,17	-	0,09		
9	Rehabilitasi jaringan pangan pemukiman, air tanah dan rawa (Juta ha)**	0,46	0,3	0,35	-	0,01		
10	Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (Juta ha)**	195,58	201,18	203,54	-	204,75		
11	Pembangunan/waduk** (Lmt)	13	8	20	-	49		

Langkah 2 - Penentuan Program Prioritas (FORM A)

1. Pengendalian Harga dan Impor Pangan.
2. Reforma Agraria
3. Stop Konversi Lahan Produktif.
4. Pembangunan Desa Mandiri Berbah
5. Peningkatan Produk Padi dan Pangan Lainnya (Protein Hewani)

Langkah 3 - Penentuan Kegiatan - Kegiatan Prioritas (FORM A)

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Pembangunan Embung/Dam Parit
2. Peningkatan Substansi Biji dan Pajuk
3. Peningkatan Berbasis Air dan Reem Pertanian
4. Pengembangan Budidaya Padi, Pengembangan Pertanian Padi Organik
5. Pemanfaatan Lahan Tidar (Optimal Lahan)
6. Technopark dan Science Park, Pengembangan Sula Perikanan
7. Pembangunan Pasar Tradisional
8. Pembaruan Bersuara/Baru Petani
9. Perencanaan Sesiak Baru

Kegiatan Prioritas

5. Pengembangan Pertanian Organik
7. Peningkatan Produk Biji, Garam, dan Rumpuk Laut
8. Pemulihan Kesehatan Lahan




Pengembangan Sistem Informasi Untuk Mendukung Bappenas Sebagai Sistem Integrator Pembangunan (3)


Sistem Informasi Manajemen
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Langkah 4 : Penentuan Detail Kegiatan Pendukung

Prioritas Pembangunan: Kesehatan Pangan
 Kegiatan Utama: Peningkatan Produksi Ikan, Garam, dan Rumpuk Laut
 Kegiatan Pendukung: Pembangunan Sarana dan Prasarana Budidaya Air Tawar, Air Payau, Mincipitan dan Tambak.

Penjabaran Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator

Menjadi keluaran matriks sebagaimana contoh pada slide 15-17

Program & Kegiatan K/L (FORM B)

Kerangka Pendanaan (FORM C)

Kerangka Regulasi (FORM D)

Kerangka Kelembagaan (FORM E)

No	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Miliar Rp.)	Aksi	Peserta
1	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang kawasan yang berdaya sang dan berkelanjutan	Jumlah kawasan budidaya yang pemananya mampu operasional secara tepat guna (*)	Belum Diterbitkan : Belum Diterbitkan	40 kawasan	0		Direktorat Kelautan dan Perikanan
2	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang kawasan yang berdaya sang dan berkelanjutan	Jumlah kelompok perikanan yang melakukan pemanfaatan infrastruktur secara efektif (*)	Belum Diterbitkan : Belum Diterbitkan	250 kelompok	0		Direktorat Kelautan dan Perikanan
3	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang kawasan yang berdaya sang dan berkelanjutan	Jumlah Kabupaten yang memenuhi syarat sebagai incipitan berbasis perikanan budidaya (*)	Belum Diterbitkan : Belum Diterbitkan	122 Kabupaten (kumulatif)	0		Direktorat Kelautan dan Perikanan
4	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	Terselenggaranya sarana di kawasan perikanan budidaya	Jumlah penerima manfaat perikanan dan marin perikanan budidaya (*)	Belum Diterbitkan : Belum Diterbitkan	750 kelompok	0		Direktorat Kelautan dan Perikanan




Matriks Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Serta Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (Form B) Hasil Aplikasi SIMU (Prioritas Nasional : Kedaulatan Pangan)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kementerian / Lembaga	Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Lokasi	Target 2017	Alokasi (Juta Rp.)	Ket
Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	"Rumah dari kebijakan" (Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)			Penyederhanaan Nomenklatur	Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu perlu sasaran yang konkret				
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Penyaluran subsidi benih dan pupuk	Kementerian Pertanian	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Facilitasi Pupuk dan Peserta	Terselenggaranya 9.55 juta Ton Pupuk Bersubsidi	Terselenggaranya 9.55 juta Ton Pupuk Bersubsidi yang terdiri dari : Ton Pupuk Urea Ton Pupuk TSP Ton Pupuk ZA Ton Pupuk Organik	Seluruh Indonesia dengan pembagian perlokasi sbb:	9.55 Ton Pupuk		
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya	... buah Waduk yang dibangun dan ... buah Waduk yang terpelihara	Terbangunnya ... buah Waduk dan terpeliharanya ... buah Waduk	Pembangunan Waduk baru, dengan lokasi sbb: ... Pemeliharaan Waduk eksisting, dengan lokasi sbb: buah embung baru buah embung dipelihara		
Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain	Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk; Pembangunan embung	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Terbangun dan terpeliharanya ... buah Embung	Terbangunnya ... buah Embung dan terpeliharanya ... buah Embung	Pembangunan Embung dengan lokasi sbb: ... Pemeliharaan Embung, dengan lokasi sbb:...			



Tindak Lanjut : Sinergi BAPPENAS-BAPPEDA

BAPPENAS

- Melakukan finalisasi program prioritas dan kegiatan prioritas yang perlu dilakukan dalam pencapaian sasaran agenda prioritas nasional oleh Kementerian/Lembaga melalui *multilateral meeting I*, *bilateral meeting* dan *multilateral meeting II* Pendekatan *top-down*
- Pembahasan indikasi lokasi dan indikasi alokasi anggaran per program
- Dari sisi perencanaan di pusat (*top-down*), digunakan instrumen Sistem Informasi Multilateral (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id/multilateral>)

BAPPEDA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

- Dari sisi perencanaan di daerah (*bottom-up*), digunakan instrumen e-musrenbang (<https://e-musrenbang.bappenas.go.id>)
- Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk dilaksanakan di daerah (lokasi) dengan pendekatan pencapaian agenda prioritas nasional melalui Usulan Prioritas Pembangunan Nasional (UPPN) melalui aplikasi e-Musrenbang.
- Melakukan usulan dukungan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga untuk kegiatan dekon dan tugas pembantuan ke daerah melalui menu Usulan Prioritas Pembangunan Daerah (UPPD) melalui aplikasi e-Musrenbang.
- Melakukan Usulan Kegiatan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan daerah melalui aplikasi e-Musrenbang.



**CONTOH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DIMENSI
SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS NASIONAL
KEDAULATAN PANGAN**



Penentuan Sasaran Pembangunan dan Arah Kebijakan Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan Tahun 2017

Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2019
Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan					
Produksi Pangan Utama:					
- Padi (Juta Ton)	70,6	75,0	76,2	77,0	82,0
Produksi Pangan Lainnya/Diversifikasi Pangan:					
- Jagung (Juta Ton)	19,1	19,8	21,4	22,4	24,1
- Kedelai (Juta Ton)	0,92	0,98	1,50	1,90	2,60
- Produksi Gula (Juta Ton)	2,6	2,6*	2,8	3,0	3,8
Produksi Sumber Protein:					
- Daging Sapi (Juta Ton)	0,45	0,42*	0,59	0,64	0,76
- Ikan (Juta ton)	10,6	13,6	14,8	16,0	18,8
Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi:					
- Pembangunan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha, kumulatif)	8,90	9,08	9,17	9,52	9,89
- Rehabilitasi dan Peningkatan jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (Juta ha)	2,71 (2010-2014)	0,48**	0,30**	0,64**	3,01 (2015-2019)
- Pembangunan irigasi tambak (Ribuh ha, kumulatif)	189,75	195,58	203,48	229,45	304,75
- Pembangunan waduk (groundbreaking)	16	13	8	9	49
	(an going)				(2015-2019)

* Angka Sementara; ** Angka Tahunan

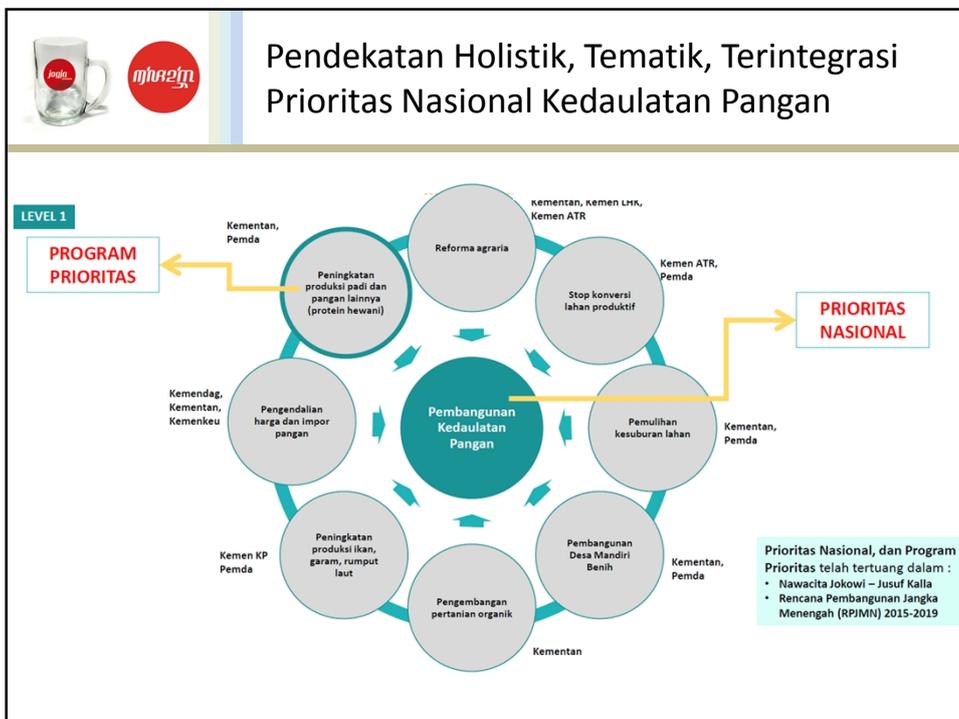
Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi
 Untuk kedelai fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga

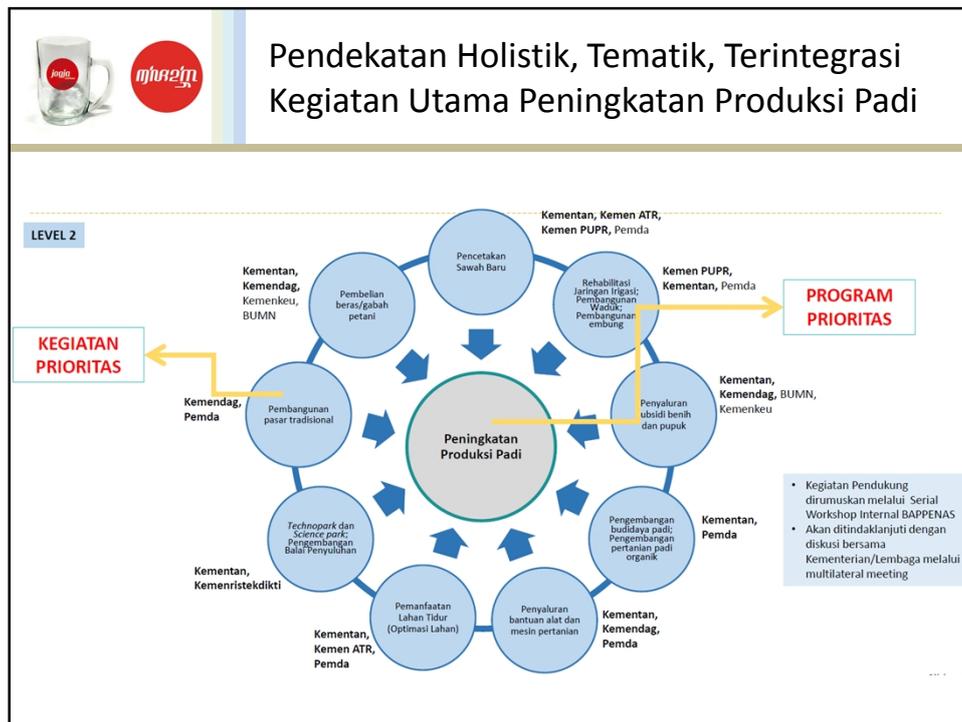
Arah Kebijakan:

- Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi. (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organik
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dengan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan
- Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras
- Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

- Penurunan pemborosan air, pupuk, pestisida serta "Food Waste" di meja makan
- Mendorong kreativitas dan inovasi
- Mendorong diversifikasi produksi/konsumsi pangan yang sehat
- Penegakan hukum dan disiplin





Pembangunan Kedaulatan Pangan Ilustrasi Integrasi Peningkatan Produksi Padi Provinsi Aceh

Pemanfaatan Waduk Keuliling (selesai 2008), Kab. Aceh Besar
 DI Keuliling Hulu (578,2 ha); DI Keuliling Hilir (1.053 ha); DI Krueng Aceh (809,3 ha, extension); dan DI Krueng Ireue (2.350 ha).

Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara, Groundbreaking 2015
 Waduk Krueng Keureuto (daya tampung 216 juta m3) akan mengairi DI Alue Ubay (4.144 ha) dan DI Krueng Pase (6.677 ha).

Peningkatan & Rehabilitasi Jaringan Irigasi (tersier) :

- Aceh Besar 6.000 ha
- Aceh Jaya 1.000 ha
- Aceh Timur 8.200 ha
- Aceh Utara 2.000 ha
- Pidie 5.500 ha
- Pidie Jaya 2.300 ha

Cetak Sawah : 14.000 ha

Desa Mandiri Benih : 40 Desa

Agro Science Park (1 unit) di BPTP Aceh

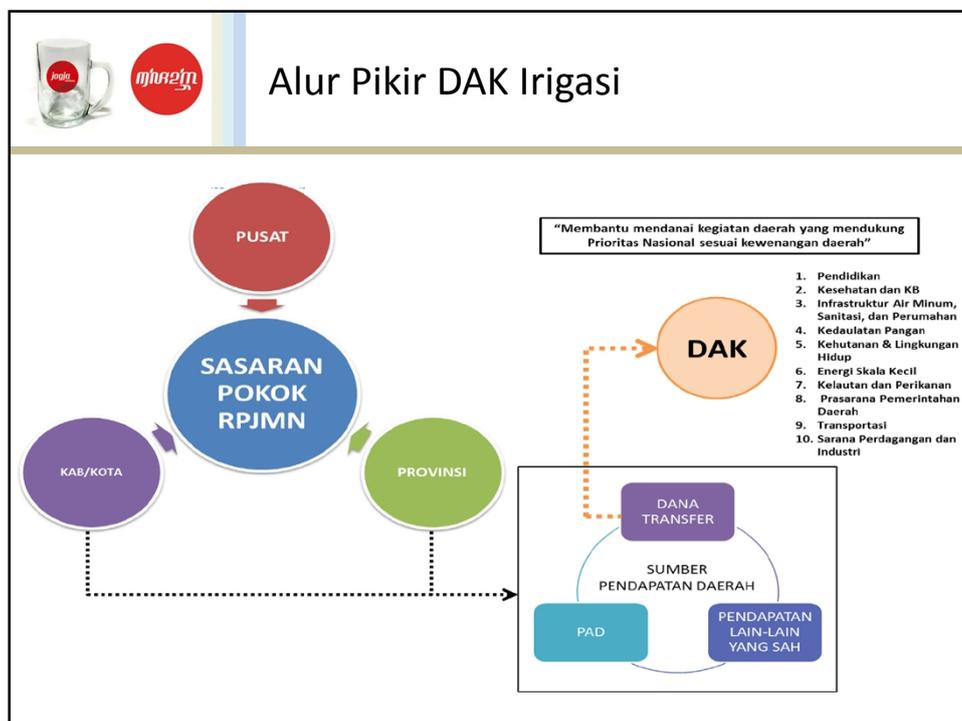
Agro Techno Park (1 unit) di Aceh Timur

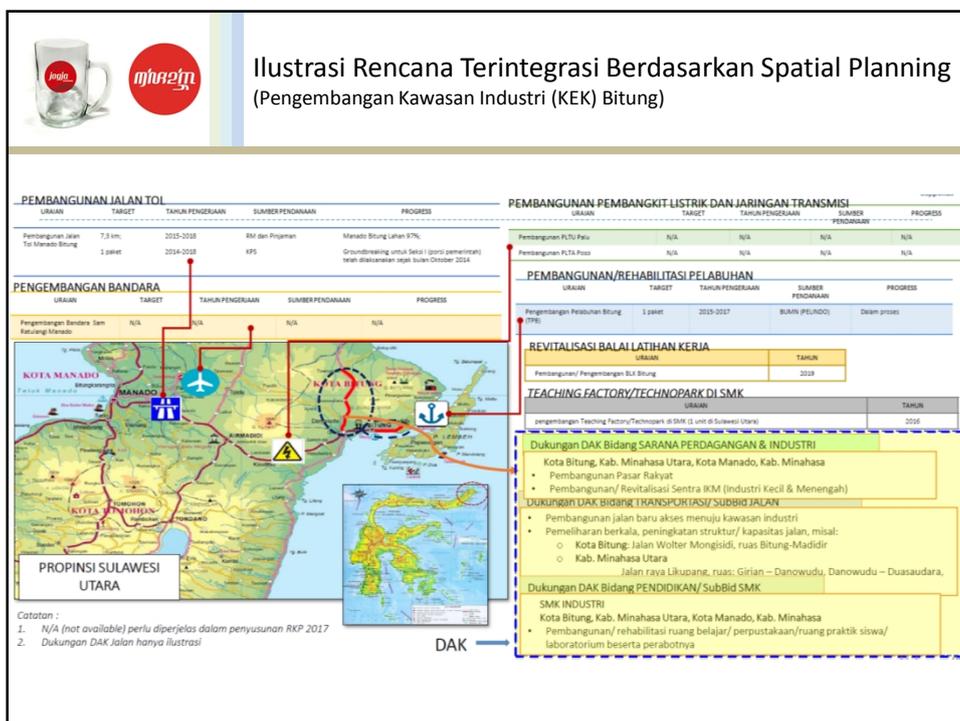
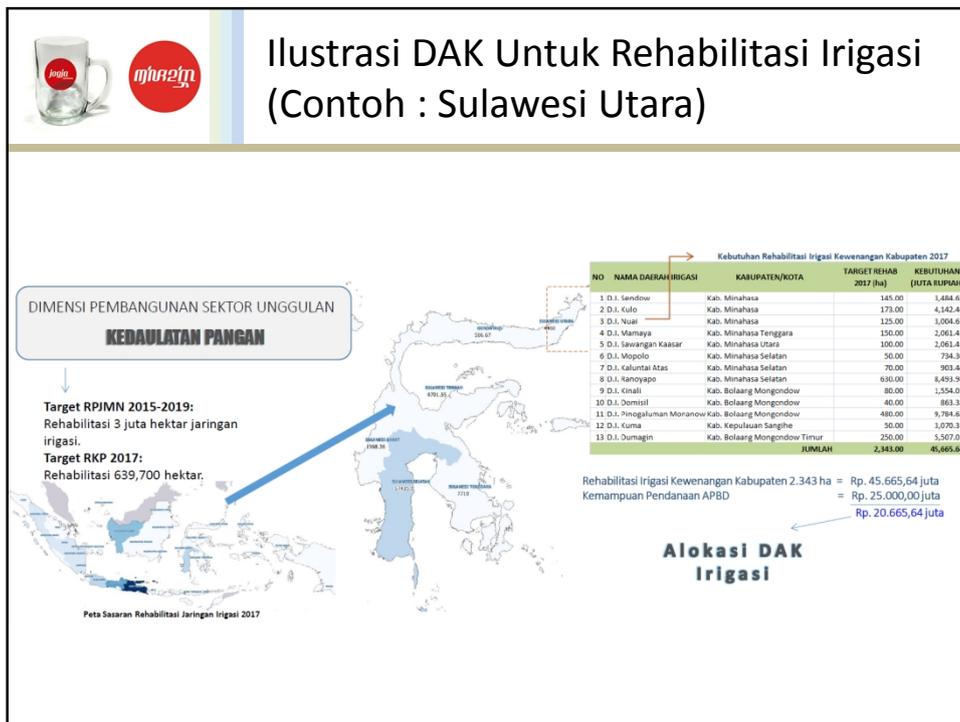
Produksi Padi Provinsi Aceh:

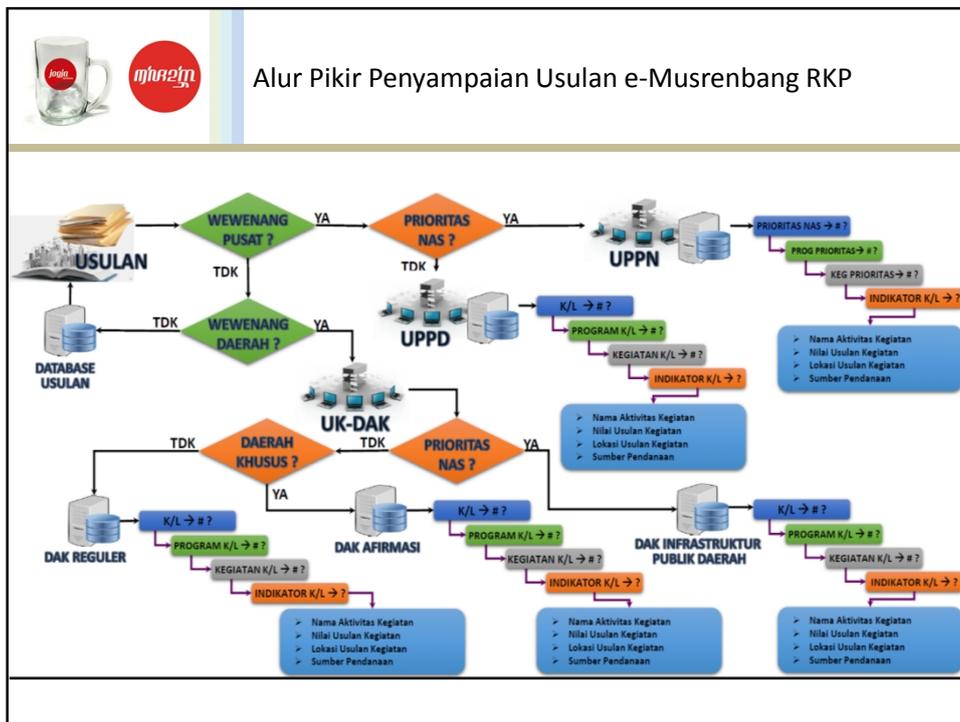
- ATAP 2014 : 1,82 juta ton
- ARAM 2015 : 2,33 juta ton
- Sasaran 2016 : 2,30 juta ton
- Sasaran 2017 : 2,37 juta ton

Petani dan Lahan Provinsi Aceh (Sensus Pertanian 2013):

- Rumah Tangga Usaha Pertanian: 644,9 ribu RT
- Luas Sawah: 300,8 ribu ha
- Luas Lahan Pertanian Non sawah: 1,05 juta ha
- Penggilingan Padi: 3.233 unit









AGENDA PELAKSANAAN





Jadwal Pengisian Aplikasi E-Musrenbang

1. Pelatihan Aplikasi e-Musrenbang (23 Februari 2016)
2. Pelatihan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi (24 Februari 2016 – 2 Maret 2016)
 - *Multilateral Meeting Tahap I di tingkat Pusat*
3. Pengisian dan Verifikasi Tahap Awal (2 Maret 2016 – 2 April 2016)
 - Input dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bappeda Kabupaten/Kota (2 Maret 2016 – 24 Maret 2016)
 - Verifikasi dilakukan oleh Bappeda Kabupaten/Kota (28 Maret 2016 – 1 April 2016)
4. Hasil Input SKPD dan Bappeda Kab/Kota menjadi masukan dalam *Multilateral Meeting Tahap II* (4-8 April 2016)
5. Pengisian dan Verifikasi Tahap Akhir (9 April 2016 – 17 April 2016)
 - Input dan Revisi hanya dapat dilakukan oleh Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi (9 April 2016 – 13 April 2016)
 - Verifikasi Akhir dilakukan oleh Bappeda Provinsi (13 April 2016 – 17 April 2016)
6. Forum Musrenbang (18 April – 30 April 2016)



SISTEM APLIKASI E-MUSRENBANG

